

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor Pertanian adalah sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara agraris sehingga sebagian besar dari penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini, dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar petani di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus Pertanian (ST) 2013 yang menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 26.135.469. Sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan karena sebesar 55,33% atau sekitar 14.248.870 rumah tangga merupakan petani gurem yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,25 ha. Kondisi tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat khususnya para petani. Saat ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih belum mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan untuk rumah tangga yang dicerminkan dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (BKP, 2013). Sedangkan menurut FAO tahun 1996 ketahanan pangan merupakan keadaan dimana semua rumah tangga mempunyai akses terhadap pangan baik fisik maupun ekonomi sehingga semua anggota rumah

tangga dapat memperoleh pangan yang cukup baik mutu maupun jumlahnya, serta keadaan dimana semua rumah tangga tidak beresiko untuk kehilangan kesempatan memperoleh pangan tersebut (Soekirman, 2000). Sistem ketahanan pangan meliputi empat sistem yaitu: (1) ketersediaan pangan baik dalam jumlah ataupun jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (2) distribusi pangan yang merata dan lancar bagi seluruh penduduk, (3) konsumsi pangan untuk setiap individu yang dapat memenuhi kecukupan gizi seimbang sehingga berdampak pada (4) status gizi masyarakat.

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada beberapa tingkat yaitu tingkat global, nasional, regional (daerah) dan tingkat rumah tangga serta individu (Suhardjo, 1996). Tingkat global, nasional serta regional ketahanan pangan dapat diukur menggunakan indikator harga pangan, kelembagaan pangan, keadaan keamanan pangan, skor PPH, tingkat ketersediaan pangan dengan memperhatikan variabel tingkat kerusakan tanaman/ternak/perikanan dan rasio stok dengan konsumsi pangan. Sedangkan untuk tingkat rumah tangga atau individu, indikator yang dapat digunakan yaitu tingkat pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, pendapatan, alokasi tenaga kerja, kesehatan dan status gizi, perubahan kehidupan sosial dan keadaan konsumsi pangan (jumlah, kualitas, kebiasaan makan) (Rachman dan Ariani, 2012).

Pangsa pengeluaran pangan yaitu rasio antara pengeluaran pangan dengan pengeluaran total rumah tangga perbulan. Hukum *working* (1943) seperti dikutip oleh Pakpahan *et al.* (1993) dalam Ariningsih dan Handewi (2008) menyatakan

bahwa pangsa pengeluaran pangan dan pengeluaran rumah tangga mempunyai hubungan yang negatif, begitu pula dengan ketahanan pangan dan pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan yang negatif juga. Artinya apabila suatu rumah tangga semakin besar pangsa pengeluaran pangan untuk pangan berarti semakin rendah ketahanan pangannya begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar *et al.* (2012) bahwa tingkat ketahanan pangan yang diukur dengan menggunakan pangsa pengeluaran pangan dapat dipengaruhi oleh pendapatan petani, jumlah anggota keluarga, pendidikan petani, harga beras, harga gula, harga sayur, harga ikan, harga minyak goreng, minyak tanah dan *dummy* petani transmigrasi dan petani lokal.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah rumah tangga pertanian terbanyak yaitu sebesar 4.290.619 rumah tangga pertanian (BPS_a, 2013). Namun, sebagian besar petaninya hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini karena sebanyak 3.312.235 rumah tangga pertanian merupakan rumah tangga gurem yang artinya hanya memiliki lahan kurang dari 0,25 ha (BPS_a, 2013). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensus Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2014, sebesar 50,37% (Rp. 313.710,-) pengeluaran penduduk di Jawa Tengah digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 49,63% (Rp. 309.150,-) dikeluarkan untuk kebutuhan bukan/non makanan. Tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah cenderung rendah karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk pangan lebih besar dari pengeluaran non pangannya. Hal ini sesuai dengan Hukum *working* (1943) seperti dikutip oleh

Pakpahan *et al.* (1993) dalam Ariningsih dan Handewi (2008) menyatakan bahwa apabila suatu rumah tangga, semakin besar pangsa pengeluaran pangan untuk pangannya berarti semakin rendah ketahanan pangannya.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi yaitu Rp. 739.150,- dengan persentase rata-rata pengeluaran untuk pangan sebesar 51,61% dan persentase untuk non pangan sebesar 48,39% (BPS_b, 2014). Hal ini berarti kesejahteraan penduduk di Kabupaten Semarang rendah karena pengeluaran pangan lebih dari non pangan. Umumnya, setiap daerah memiliki gaya hidup yang berbeda-beda serta terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya seperti harga bahan pokok dan non pokok di daerah tersebut dan potensi wilayah tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap pengeluaran pangannya.

Kecamatan Suruh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang terdiri dari 17 desa dengan luas 64,02 km². Secara geografis Kecamatan Suruh di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tengaran, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Bancak dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Susukan. Kecamatan Suruh merupakan kecamatan di Kabupaten Semarang dengan jumlah petani terbanyak yaitu 12.747 petani yang terdiri dari 10.050 petani laki-laki dan 26.97 petani perempuan. Potensi pertanian yang terdapat di Kecamatan Suruh yaitu padi, jagung, cabe, kelapa, kopi dan cengkeh. Namun sebagian besar petaninya bermata pencaharian di sektor tanaman pangan yaitu padi dan jagung. Berdasarkan data Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi

Tingkat Kecamatan Suruh menunjukkan bahwa terdapat 17 Gapoktan dan 109 Poktan yang tersebar di Kecamatan Suruh.

Permasalahan yang sering dihadapi rumah tangga petani adalah pendapatan yang didapatkan petani rata-rata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini diakibatkan oleh lingkungan sosial ekonomi disekitar tempat tinggal petani yang tidak sesuai dengan kondisi petani. Harga bahan-bahan pokok yang terus naik tetapi pendapatan petani cenderung tetap, oleh karena itu tingkat ketahanan pangan atau kesejahteraan petani menurun. Ketahanan pangan rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Indikator yang digunakan dalam menghitung kesejahteraan petani dapat diukur menggunakan pangsa pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latarbelakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Berapa besarnya proporsi proporsi rumah tangga yang tahan pangan dan tidak tahan pangan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang?
- 2) Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Mengetahui besarnya proporsi rumah tangga yang tahan pangan dan tidak tahan pangan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Bagi pemerintah Kabupaten Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun kebijakan khususnya yang terkait masalah ketahanan pangan rumah tangga petani di Kabupaten Semarang
- 2) Bagi peneliti yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian,
- 3) Bagi rumah tangga petani yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan petani dapat lebih efisien dalam menyusun anggaran rencana belanja rumah tangga.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga secara bersama-sama faktor pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani dapat mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani.

2. Diduga secara parsial faktor pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan ibu rumah tangga, harga bahan pokok beras, pengetahuan gizi, konsumsi protein hewani serta *dummy* konsumsi harian protein nabati dan hewani dapat mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani.